

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Menjelang akhir abad ke-19 masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang serba terbelakang. Pejajahan serta penindasan mengakibatkan kemunduran segala bidang, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pendidikan. Di bidang politik misalnya, semua jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan berada di tangan bangsa asing, sedangkan bangsa Indonesia hanya menduduki jabatan-jabatan rendah. Selain itu pihak penjajah selalu menanamkan benih-benih perpecahan dengan menjalankan politik *divide et impera*, seperti yang dilakukan terhadap golongan pangreh-praja di Jawa, kaum adat di Sumatera Barat, dan Oele-balang di Aceh. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kartodirdjo bahwa:

Kedudukan masing-masing golongan beserta sikap religius mereka menyebabkan perbedaan reaksi mereka, suatu perbedaan yang sering menimbulkan konflik di dalam, dan dengan demikian melemahkan reaksi dalam totalitasnya terhadap Belanda. Sehubungan dengan hal itu cukup leluasa bagi Belanda untuk menjalankan politik "*divide et impera*" pecah dan kuasailah (1988, hlm. 374).

Praktik kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda membuat rakyat Indonesia melancarkan berbagai reaksi dan perlawanan. Sebelum tahun 1900, perlawanan rakyat Indonesia bersifat kedaerahan. Seperti, Perang Padri (1819-1832), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Banjarmasin, Perang Aceh (1873-1912). Menurut Kartodirdjo (1999, hlm. 372) Perlawanan-perlawanan tersebut pada umumnya disebabkan oleh ideologi agama. Masyarakat tradisional menganggap bahwa kedatangan bangsa Belanda menyebabkan ketidaksesuaian dalam kehidupan mereka yang merusak tatanan kehidupan dan mempersulit kehidupan beragama. Selain itu, anggapan *kafir* terhadap Belanda yang mengancam kedudukan *dar-Islam* menganggap perlawanan tersebut sebagai perang sabil. Perlawanan-perlawanan tersebut juga bersifat tradisional dan tidak ada struktur organisasi yang jelas, sehingga ketika pemimpinnya ditangkap maka berakhirilah perlawanan tersebut. Maka dari itu, perlawanannya mudah untuk

ditumpas oleh pemerintah kolonial. Hal ini sejalan dengan Poesponegoro dan Notosoesanto (2010, hlm. 398), bahwa perlawanan-perlawanan tersebut umumnya bersifat arkais atau tradisional karena organisasinya, programnya, serta strateginya yang bersifat sederhana. Sehingga tidak sulit untuk ditindas pergerakannya karena tidak ada koordinasi satu sama lain serta masih ketergantungannya pada seorang pemimpin.

Memasuki abad 20, situasi politik Indonesia memasuki fase pergerakan nasional. Pada fase ini bentuk perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia mulai ada perbedaan yang mulanya dilakukan dalam bentuk perang namun dalam fase pergerakan mulai banyak berdiri organisasi yang meliputi segala bidang. Seperti yang diungkapkan oleh Sudiyo (2002, hlm. 20) bahwa “...pergerakan nasional bersifat *multidimensional*. Artinya, meliputi segala bidang, yaitu sosial, budaya, ekonomi, dan politik”. Organisasi-organisasi yang didirikan tersebut tentu memiliki perbedaan aspek namun memiliki tujuan yang sama yakni menentukan nasib sendiri, maka cita-cita yang akan dicapai menjadi tanggung jawab bersama atas dasar senasib dan sepenanggungan.

Keadaan masyarakat Indonesia yang semakin memburuk dari segi ekonomi, sosial, budaya maupun pendidikan mendapat reaksi keras dari kalangan pribumi bahkan ada pula dari kalangan orang Belanda sendiri, di antaranya adalah van de Kol, van de Venter, dan Brooschooft. Van De Kol menjadi juru bicara dari golongan Sosialis yang berpengalaman di Indonesia. Ia mengkritik keadaan di Indonesia yang semakin merosot. Hal yang sama diungkapkan oleh Brooschooft yang mengemukakan bahwa selama satu abad lebih pemerintah kolonial telah mengambil keuntungan atau bagian dari penghasilan rakyat Indonesia (Poesponegoro dan Notosoesanto, 1993a, hlm. 35). Hal tersebut menyebabkan dicetuskannya politik etis oleh pemerintah kolonial yang menggunakan tiga sila yaitu, irigasi, edukasi, dan emigrasi (Kartodirdjo, 1999, hlm. 32). Ketiga sila tersebut akhirnya merubah kebijakan politik kolonial Hindia Belanda yang di sisi lain dapat memberi keuntungan bagi pemerintah kolonial yang dapat menjadikan kaum pribumi sebagai tenaga kerja murah di jajaran pemerintahan, tetapi juga dapat menjadi *boomerang* bagi pemerintah kolonial. Adanya paham-paham baru tentang kebangsaan dan kebebasan yang datang dari luar akan semakin

menyadarkan kaum pribumi tentang sistem kolonialisme dan akan meruntuhkan pemerintah kolonial.

Edukasi atau pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting bagi perubahan sejarah di Indonesia. Maka dari itu, didirikanlah beberapa sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut Sudirman (2014, hlm. 273) faktor paling berpengaruh bagi perkembangan bangsa Indonesia dari ketiga gagasan tersebut adalah dalam bidang pendidikan. Melalui pendidikan, bangsa Indonesia mulai mengalami perkembangan pemikiran sebagai pondasi bagi lahirnya ide tentang nasionalisme. Pemikiran tentang nasionalisme nantinya merupakan landasan untuk mendirikan organisasi-organisasi pergerakan nasional yang kemudian akan mengantarkan Indonesia ke gerbang pintu kemerdekaan. Adanya organisasi yang muncul merupakan akibat dari adanya kebijakan politik etis yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda khususnya di bidang pendidikan yang telah memunculkan fenomena baru yaitu munculnya golongan elit intelektual. Golongan ini merupakan orang muda dari kalangan bangsawan yang telah memanfaatkan kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh pendidikan Barat (Gunawan, 2011).

Pendidikan Barat yang dienyam oleh golongan bangsawan semakin meningkat sejak dibukanya lembaga-lembaga pendidikan gaya Barat sejak akhir abad 19. Bahkan sejak 1864, orang-orang Jawa telah diterima di sekolah-sekolah Belanda (Scherer, 1985, hlm. 43). Pendidikan menawarkan kepada mereka kemungkinan-kemungkinan baru untuk menduduki bidang-bidang lain di pemerintahan. Melalui kesempatan yang diberikan kepada kaum pribumi untuk memperoleh dalam pendidikan sistem sekolah Belanda, maka banyak golongan intelektual menjadi sadar akan politik dan berkembang menjadi pemimpin serta pelopor dalam gerakan kebangsaan untuk mencapai Indonesia merdeka, terutama yang terpilih masuk di perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri (Suwondo, 1996, hlm. 8).

Selain politik etis, adanya organisasi ini disebabkan oleh beberapa peristiwa yang terjadi di berbagai wilayah, seperti kemenangan Jepang terhadap Rusia tahun 1905, nasionalisme yang digerakan oleh Turki Muda, Revolusi Cina 1911.

Serta adanya kepercayaan untuk memegang tampuk kendali perlawanan menghadapi penindasan nasional dan sosial (Rutgers, 2012, hlm. 2). Faktor-faktor tersebut memotivasi rakyat Indonesia agar terbebas dari cengkraman kolonialisme Belanda.

Banyak tokoh intelektual yang bermunculan saat itu untuk membangkitkan kesadaran nasionalisme dan menentang kolonialisme Belanda. Di antaranya, para pelajar STOVIA (*School tot Opleiding van Indischeshe Artsen*) yang diketuai oleh Soetomo mendirikan Budi Utomo, Haji Samanhoedi, Haji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto, E.F.E Douwes Deker yang mendirikan Sarekat Dagang Islam. Mohammad Hatta yang mendirikan Perhimpunan Indonesia di Belanda, Soekarno yang mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia (PNI), R.M. Suwardi Suryaningrat yang mendirikan Taman Siswa (Vlekke, 2008, hlm. 419). Banyaknya tokoh intelektual yang bermunculan saat itu disebabkan karena ketidakpuasan kaum pribumi terhadap kebijakan pemerintah kolonial yang seolah-olah mengekang kebebasan kaum pribumi. Oleh karena itu, mereka mendirikan suatu wadah yang bergerak di beberapa bidang untuk menampung aspirasi rakyat Indonesia.

Semangat persatuan juga merambah ke dada para pemuda Indonesia. Mereka juga menginginkan suatu wadah yang menaungi aspirasi mereka. Atas dorongan Mr. Sartono dan Mr. Sunario pada tanggal 20 Februari 1927 di Bandung didirikanlah sebuah organisasi pemuda yang dikenal *Jong Indonesia* yang kemudian diubah namanya menjadi Pemuda Indonesia (Sagimun, 1989, hlm.165). Puncaknya, organisasi-organisasi dari para pemuda mengadakan sebuah kongres yang dikenal dengan Sumpah Pemuda yang berisi Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa. Pendorong utama di balik penyelenggaraan dan pelaksanaan Sumpah Pemuda adalah Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia (PPPI) yang didominasi oleh mahasiswa-mahasiswa hukum dan beberapa mahasiswa kedokteran di Batavia (Kurniadi, t.t. hlm. 80). Semangat tersebut terus menggelora dan menyebar ke berbagai pelosok nusantara. Sehingga nama Indonesia pun mulai dikenal saat itu dan membuat rakyat Indonesia semakin sadar akan paham nasionalisme.

Rekam jejak para tokoh tersebut dalam menentang pemerintahan kolonial Belanda serta membangkitkan kesadaran nasional sangat menarik untuk diteliti lebih dalam. Beberapa di antaranya adalah Soekarno yang mendirikan PNI bersama Ir. Anwari, M. Iskaq Cokrohadisuryo, Mr. Sartono, Mr. Sunario, Mr. Budhiarto, dr. Samsi, Tilaar, Sudjadi. PNI merupakan organisasi politik yang didirikan 4 Juli 1927, (Sudiyo, 2002, hlm.73). Menurut Sagimun (1989, hlm. 93) PNI bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia atas asas percaya akan kekuatan dan kemampuan bangsa Indonesia sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun serta berusaha untuk mempertebal rasa kesadaran dan kesatuan nasional. Berdirinya PNI memiliki pengaruh luas tidak hanya di dalam negeri akan tetapi sampai ke luar negeri. Bahkan antara PNI dan Perhimpunan Indonesia memiliki hubungan erat yang terjalin antara Soekarno dan Moh. Hatta. Mereka saling bertukar informasi tentang kejadian di Indonesia maupun di Belanda.

Adapun usaha-usaha yang dijalankan oleh PNI menurut Pringgodigdo (1994, hlm. 69) yaitu usaha politik, ekonomi, dan sosial. Usaha politik yaitu memperkuat rasa kebangsaan dan kesadaran atas persatuan bangsa Indonesia serta memajukan pengetahuan sejarah kebangsaan. Usaha ekonomi yaitu memajukan penghidupan yang merdeka, memajukan perdagangan kebangsaan, kerajinan, bank-bank, dan koperasi. Usaha sosial yaitu memajukan pengajaran yang bersifat kebangsaan, memperbaiki kedudukan kaum wanita. Menurut Utomo (1995, hlm. 107) PNI yang merupakan partai pembaharu di kalangan nasionalis dengan tempo kegiatannya yang meningkat dengan berbagai usaha menimbulkan suasana tegang sehingga pemerintah kolonial pun melakukan pengawasan dan tindakan yang tegas terhadap aktivis PNI yang dianggap membahayakan pemerintahan kolonial.

Menyadari usaha dari PNI semakin meluas, pada tanggal 29 Desember 1929 pemerintah kolonial menggeledah semua kantor dan rumah pemimpin-pemimpin PNI beserta propaganda-propagandanya. Pemerintah kolonial Belanda pun menangkap beberapa pimpinan dari PNI di antaranya Soekarno, Maskun, Supriadinata, dan Gatot Mangkupradja. Mereka diadili di pengadilan Bandung karena dianggap membahayakan pemerintahan kolonial atas beberapa tulisan tentang kemerdekaan setiap bangsa yang dimuat di beberapa surat kabar (Utomo, 1995, hlm. 109). Melihat Soekarno bersama tiga orang lainnya diadili, Mr.

Reza Azhari, 2016

REKAM JEJAK POLITIK MR. RADEN MAS SARTONO DI INDONESIA TAHUN 1927 - 1960

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sartono membela mereka dengan menjadi pengacara dalam pengadilan tersebut. Mr. Sartono merupakan lulusan dari Universitas Leiden dan memiliki gelar *Meester Rechten* yang bergerak di bidang hukum. Ketika menjadi pengacara, Mr. Sartono menolak tuduhan jaksa atas perbuatan Soekarno yang menghasut massa untuk melawan kolonialisme, karena menurutnya yang dilakukan oleh Soekarno adalah perbuatan untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsanya dan kewajiban melawan imperialisme (Daradjadi, 2014, hlm. 13). Walaupun sudah mendapatkan pembelaan dari Mr. Sartono, Soekarno dan tiga orang lainnya tetap dihukum dengan kurungan 4 tahun penjara di penjara Banceuy, Bandung.

Dengan dipenjaranya Soekarno, menimbulkan reaksi dari para anggota PNI, apakah PNI harus tetap ada atau dibubarkan mengingat partai tersebut sudah dianggap terlarang oleh pemerintah kolonial Belanda. Tanggal 25 April 1931, Mr. Sartono selaku pimpinan PNI yang masih ada menyelenggarakan kongres di Jakarta yang dihadiri oleh 14 cabang PNI di setiap daerah. Kongres tersebut akhirnya memutuskan membubarkan PNI dan membentuk Partai Indonesia atau Partindo sebagai partai pengganti PNI yang diketuai oleh Mr. Sartono. Asas Partindo yaitu menentukan nasib sendiri, Persatuan Indonesia, Kerakyatan dan Kebangsaan. Pada dasarnya Partindo merupakan nama lain dari PNI karena memiliki tujuan sama dengan PNI (Simbolon, 2006, hlm. 374). Sebelum mengadakan kongres tersebut, kegalauan sempat menghampiri hati Mr. Sartono karena beliau adalah satu-satunya pemimpin PNI yang tidak ditangkap. Beliau pun harus segera memutuskan tentang status PNI, apakah PNI harus tetap ada dengan statusnya yang terlarang atau mendirikan organisasi baru. Keputusan yang diambil oleh Mr. Sartono ini cukup berani dengan memilih mendirikan partai baru. Hal ini disebabkan karena PNI yang saat itu sedang ‘mati suri’ serta ditangkapnya Soekarno karena dianggap akan mengadakan aksi pemberontakan terhadap pemerintah kolonial, sudah tidak bisa diteruskan lagi perjuangannya.

Dalam kongres Partindo, Mr. Sartono berpidato bahwa Partindo adalah sebuah partai politik yang menghendaki kemerdekaan penuh bagi Indonesia dan mendasarkan programnya pada empat prinsip, yakni menentukan nasib sendiri, kebangsaan Indonesia, menolong diri sendiri, dan demokrasi (Ingleson, 1988, hlm. 194). Partindo terdiri dari seluruh lapisan masyarakat, lapisan atas dan

bawah, lapisan kaya dan miskin, dan bukan partai untuk kepentingan kelompok tertentu. Partindo adalah partai demokratis, non-kooperatif dan radikal, yang dalam kegiatan ekonomi dan sosialnya berusaha menyiapkan Indonesia untuk merdeka. Didirikannya Partindo menuai pro kontra di kalangan mantan pemimpin PNI, ada yang mendukung ada pula yang menolak. Salah satunya yaitu Mohammad Hatta yang marah dan sedih atas tindakan yang dilakukan oleh Mr. Sartono karena dianggap memalukan dan melemahkan pergerakan rakyat Indonesia yang tidak mau berkorban (Hatta, 2011, hlm. 6). Maka dari itu, Hatta bersama orang yang kontra terhadap Partindo membentuk Golongan Merdeka yang kemudian menjadi Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru). PNI Baru ini dipimpin oleh Hatta dan Sjahrir yang bermaksud mendidik kader partai yang tidak mengenyam pendidikan formal tinggi, yang berasal dari rakyat biasa, bukan berlatar belakang priyai atau ningrat (Alfarizi, 2009, hlm. 72).

Hatta, Soedjadi, dan Sjahrir merupakan pihak yang tidak setuju dengan didirikannya Partindo oleh Mr. Sartono dan menuding pembubaran PNI adalah tanggung jawab Mr. Sartono (Sutan, 1985, hlm. 116). Tindakan yang diambil oleh Mr. Sartono tersebut membuat persahabatannya dengan Hatta kian memudar. Sebelum adanya pertentangan tersebut, Mr. Sartono dikenal sangat dekat dengan Hatta. Saat bersama Hatta, beliau juga bersama-sama pernah merasakan pendidikan di Universitas Leiden di Belanda dan bergabung dengan Perhimpunan Indonesia yang bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun persahabatan tersebut luntur ketika Sartono dan Hatta berbeda pendapat dalam menyikapi kebijakan pemerintah kolonial tentang dilarangnya PNI.

Berdirinya Partindo menjadikan aktivitas politik Mr. Sartono dan kawan-kawan kembali berlanjut. Apalagi ketika Soekarno telah keluar dari penjara dan memilih Partindo sebagai kendaraan politiknya. Adanya persamaan visi dan misi dalam hal aksi massa antara PNI dan Partindo menjadi alasan bagi Soekarno lebih memilih Partindo dari pada PNI Baru bentukan Hatta dan Sjahrir (Ricklefs, 2009, hlm. 406). Organisasi Partindo ini kembali melancarkan aktivitasnya dengan melakukan ide-ide atau gagasan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan untuk kedua kalinya, pemerintah kolonial kembali menangkap Soekarno pada tanggal 30 Juli 1933, kemudian dibuang ke Ende lalu dipindahkan ke Bengkulu

Reza Azhari, 2016

REKAM JEJAK POLITIK MR. RADEN MAS SARTONO DI INDONESIA TAHUN 1927 - 1960

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

(Kansil dan Julianto, 1988, hlm. 37). Sama halnya dengan pimpinan PNI Baru seperti Hatta dan Sjahrir, pemerintah kolonial melakukan pembuangan terhadap mereka ke Digul. Bulan April 1937, bekas-bekas pemimpin Partindo, seperti Mr. Sartono, A.K Gani, dan Moh. Yamin mendirikan organisasi baru yang diberi nama Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Namun, Gerindo juga tidak bertahan lama setelah adanya perbedaan pendapat di kalangan pimpinan Partindo.

Mr. Sartono merupakan seorang yang memiliki kecakapan dalam bidang hukum dan pemerintahan. Dalam bidang hukum, beliau merupakan lulusan sarjana hukum yang bergelar *Meester Rechten* dari Universitas Leiden Belanda, sehingga beliau didaulat menjadi pengacara ketika Soekarno diadili di *landraad* Bandung. Dalam bidang pemerintahan beliau pernah menjabat sebagai anggota parlemen. Bahkan beliau juga berpartisipasi dalam Gerakan Politik Indonesia (GAPI) yang merupakan suatu wadah musyawarah di antara beberapa partai pergerakan nasional. Di zaman pendudukan Jepang, Mr. Sartono bersama Soekarno dan Hatta menjadi anggota *Chuo Sangi In* yaitu Dewan Pertimbangan Pusat di Jakarta yang dimaksudkan untuk menjamin partisipasi orang Indonesia secara terbuka di dalam menentukan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pemerintah militer Jepang (Herkusumo, 1984, hlm. 29).

Pasca kemerdekaan, dengan keteguhan hatinya dalam dunia politik mengantarkan Mr. Sartono mendapat amanah yang penting dengan menjadi ketua DPR pasca perjanjian Konferensi Meja Bundar, dan pada puncaknya terpilih sebagai ketua DPR hasil pemilu tahun 1955 (Tjiptoning, 1951, hlm. 28). Namun, ketika kondisi politik setelah pemilu 1955 tidak stabil, dan tidak stabilnya ekonomi Indonesia dengan kegagalan beberapa kebijakan, serta banyaknya pergolakan di berbagai daerah, menimbulkan Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan menggantikannya dengan DPR GR (Gotong Royong). Hal tersebut menimbulkan pertentangan antara Soekarno dengan Mr. Sartono. Mr. Sartono menolak menjadi ketua DPR GR dengan alasan “*Menjadi anggota DPR yang bukan karena pilihan rakyat merupakan hal yang bertentangan dengan hati nurani*” (Daradjadi, 2014). Selain itu juga, setelah Indonesia merdeka, pada masa Kabinet pertama, Mr. Sartono menjadi menteri Negara urusan daerah kerajaan, hal

ini didasari atas pertimbangan Mr. Sartono merupakan seorang keturunan raja dari kesultanan Surakarta jadi beliau dianggap pantas dalam menduduki jabatan tersebut (Tjiptoning, 1951, hlm. 25).

Mr. Sartono yang menjunjung nilai-nilai demokrasi menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Soekarno telah merusak nilai demokrasi dengan menerapkan demokrasi terpimpin. Menurut Vasil (dalam Fachruddin, 2006, hlm. 50) Soekarno menerapkan sistem Demokrasi Terpimpin, yang menjadikan dirinya sebagai pusat kekuasaan, melakukan pengawasan ke seluruh negeri, mengarahkan dan menciptakan dasar sistem ideologi dan kelembagaan. Soekarno kemudian mendeklarasikan dirinya menjadi “Presiden Seumur Hidup” serta melarang Partai Masyumi dan PSI. Hal tersebut tentu bersebrangan dengan konsep demokrasi yang membebaskan hak berpendapat. Pertentangan dengan Soekarno ini membuat Mr. Sartono harus meninggalkan jabatannya sebagai Ketua DPR.

Rekam jejak politik yang dilalui oleh Mr. Sartono sangat menarik untuk dikaji terlebih beliau merupakan orang yang ahli di bidang hukum tapi berkecimpung di dunia politik. Seperti pengurus Perhimpunan Indonesia, ketua muda pengurus PNI, ketua Partindo, ketua pengurus besar Gerindo, dan ketua pengurus Harian Majelis Rakyat Indonesia. Beberapa keputusan yang dilakukannya cukup menimbulkan pro kontra di kalangan para tokoh pergerakan, terbukti beliau pernah bertentangan dengan Moh. Hatta dalam pembubaran PNI dan mendirikan Partindo. Serta bertentangan dengan Soekarno ketika menolak menjadi anggota DPR. Terlepas dari pada itu di antara Mr. Sartono, Soekarno, dan Hatta merupakan orang yang ikut andil dalam memperjuangkan maupun mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, keteguhan hatinya dalam dunia pemerintahan membuat beliau ditetapkan sebagai Bapak Parlemen Indonesia (Daradjadi, 2014).

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang perjalanan Mr. Raden Mas Sartono dalam bidang Politik. Dengan demikian penulis memutuskan untuk mengangkat judul **“Rekam Jejak Politik Mr. Raden Mas Sartono di Indonesia Tahun 1927 – 1960”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam kajian penelitian ini. Adapun rumusan masalah penulis adalah **Bagaimana Rekam Jejak Politik Mr. Raden Mas Sartono di Indonesia Tahun 1927 – 1960**. Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis membagi ke dalam beberapa pertanyaan penelitian, antara lain:

1. Bagaimana latar belakang kehidupan Mr. Raden Mas Sartono?
2. Bagaimana pemikiran-pemikiran politik Mr. Raden Mas Sartono?
3. Bagaimana peran Mr. Raden Mas Sartono dalam dinamika politik Indonesia tahun 1927 – 1960?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan dari penelitian ini yaitu menjelaskan rekam jejak Mr. Raden Mas Sartono di bidang politik tahun 1927 – 1960. Sedangkan, tujuan khususnya antara lain :

1. Menjelaskan latar belakang kehidupan Mr. Raden Mas Sartono.
2. Mengidentifikasi pemikiran-pemikiran politik Mr. Raden Mas Sartono.
3. Mendeskripsikan peran Mr. Raden Mas Sartono dalam dinamika politik Indonesia tahun 1927 – 1960.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai perjalanan salah seorang tokoh politik di Indonesia yang bernama Mr. Raden Mas Sartono di bidang politik tahun 1927 – 1960. Adapun manfaat secara praktis dari penelitian ini antara lain:

1. Memperkaya penelitian sejarah Indonesia, terutama mengenai peranan Mr. Raden Mas Sartono sebagai tokoh politik yang ada di Indonesia.
2. Memberikan pemahaman mengenai sejarah Indonesia dari zaman pergerakan Nasional, zaman kemerdekaan, hingga zaman Demokrasi Liberal, yang dapat dijadikan sumber referensi mata pelajaran sejarah Indonesia.

3. Menambah wawasan mengenai sistem politik koperasi dan non koperasi rakyat pribumi dalam melawan praktik Pemerintahan Kolonial Belanda.
4. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi peserta didik SMA tentang materi Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika penulisan merupakan sebuah gambaran yang menyeluruh mengenai penelitian yang akan dilakukan dari tahap awal sampai pada proses penulisannya. Adapun struktur organisasi yang akan dijelaskan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari beberapa bab antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah penelitian, tujuan, dan manfaat penelitian. Pada bagian ini penulis memberikan alasan mengenai alasan harus mengadakan penelitian tentang Rekam Jejak Politik Mr. Raden Mas Sartono di Indonesia Tahun 1927 – 1960. Latar belakang masalah yang diuraikan dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perjuangan rakyat Indonesia pada zaman pergerakan nasional yang diawali dengan lahirnya beberapa organisasi pergerakan nasional, seperti Boedi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, PNI dan Pertindo, yang kemudian melahirkan salah satu tokoh yang cukup berperan dalam pembentukan PNI yaitu Mr. Raden Mas Sartono. Tokoh Mr. Sartono ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam tentang perjalanannya karena ketika beliau memutuskan untuk membubarkan PNI dan mendirikan Partindo membuat pro kontra di kalangan tokoh nasional. Untuk memperinci dan membatasi permasalahan agar tidak melebar maka dicantumkan rumusan masalah.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini penulis memaparkan sumber-sumber yang akan digunakan dalam membahas permasalahan. Kajian kepustakaan ini akan penulis kembangkan melalui penelaahan secara mendalam terhadap sumber-sumber atau referensi-referensi yang berhubungan dengan kajian yang akan diteliti oleh penulis. Sumber-sumber yang digunakan oleh penulis yakni berupa beberapa karya ilmiah

yang disusun dalam bentuk buku maupun artikel yang berkaitan dengan rekam jejak Mr. Raden Mas Sartono.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah yang digunakan oleh penulis yang berupa metode penulisan dan teknik penelitian yang menjadi dasar atau landasan penulis untuk mencari sumber-sumber maupun referensi-referensi yang kemudian diolah dan dianalisis sesuai dengan metode yang digunakan. Sumber-sumber yang digunakan oleh penulis berupa buku-buku yang relevan dengan pembahasan yang akan dikaji. Adapun metode yang digunakan antara lain mengacu pada pendapat Helijus Sjamsuddin yang terdiri dari Heuristik, Kritik Internal dan Eksternal, interpretasi, dan tahap akhir yakni Historiografi. Semua prosedur serta tahapan-tahapan yang ditempuh dalam penelitian ini mulai dari tahap persiapan hingga penulisan ini diuraikan secara rinci dalam bab ini.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan yang akan dikaji oleh penulis. Bab ini juga akan menjawab beberapa rumusan pertanyaan yang dipaparkan pada BAB I. Jawaban dari pertanyaan penelitian tersebut telah dianalisis oleh penulis dengan mengkaji beberapa sumber yang telah dikritik sebelumnya. Bab IV ini penulis bagi ke dalam empat bagian. Bagian pertama menjelaskan tentang latar belakang kehidupan Mr. Raden Mas Sartono, hal ini penulis meanggap perlu untuk melihat kehidupan Mr. Sartono yang berasal dari keturunan Kesultanan Surakarta yang kemudian juga mengenyam pendidikan Barat hingga akhirnya mendapat gelar sarjana hukum di Universitas Leiden, Belanda. Bagian kedua, menjelaskan tentang isi pemikiran-pemikiran dari Mr. Sartono tentang politik serta menjelaskan kebijakan beliau tentang keputusan membubarkan PNI yang menuai kontroversi di kalangan tokoh-tokoh pergerakan. Bagian ketiga, menjelaskan tentang peran Mr. Sartono dalam sejarah pergerakan nasional mulai dari kiprahnya di PNI hingga keikutsertaan beliau dalam Gerakan Politik Indonesia. Bagian keempat, menjelaskan tentang pengaruh dari kebijakan Mr. Sartono yang memberikan dampak bagi dunia perpolitikan Indonesia seperti pecahnya PNI hingga kebijakan beliau saat menjadi ketua DPR Indonesia pasca Konferensi Meja Bundar (KMB).

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan karya ilmiah yang berisi kesimpulan dari penulis sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Dalam bab ini juga, penulis memaparkan hasil analisis pada pembahasan yang dijelaskan pada bab empat yang menggambarkan rekam jejak politik Mr. Raden Mas Sartono di Indonesia tahun 1927-1960. Selain itu, saran dan rekomendasi juga penulis cantumkan dalam bab ini sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.